

POHON KINERJA
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN
KEBIJAKAN HUKUM DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI (K_{11}) , 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (S_{12}) , 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S_{13}) , 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (S_{14})

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (S_{21}) , 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (S_{22}) , 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (S_{23})

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P_{11}) , 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P_{12})

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{21}) , 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{22})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{31}) , 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{32})

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{41}) , 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{42})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{51}) , 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{52})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{61}) , 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{62})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{11})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K_{21})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K_{31})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (K_{41})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (K_{51})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (K_{61})

Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi NA oleh Tim Perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk Pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampainya hasil produk hukum DPD RI
IK : 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog, FGD hasil produk hukum DPD RI, 2) Identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan regulasi aturan dan penguatan sistem nasional

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA, 2) Penetapan RUU inisiatif DPD RI

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Penghimpunan tim pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan amanda selama 1 (satu) tahun sejak kali yang bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah, 2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Output

Output